



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHYAR
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 443616

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.455.310.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 13000 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 8000 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000
6. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
7. Tanah Seluas 1151 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 195.670.000
8. Tanah Seluas 1192 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 202.640.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 4000 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 210.000.000



1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR VGT Tahun 2014,
HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	44.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.402.686
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.735.312.686
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.735.312.686

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.